

GOOD GOVERNANCE DI LEVEL MIKRO: STUDI INTEGRITAS, TRANSPARANSI, DAN RESPONSIVITAS PEMERINTAH KELURAHAN PONJALAE KOTA PALOPO PADA KOMUNITAS PESISIR

Herman¹, Faisal², Masjrul Janto Usman³, Arif Ferdian⁴

¹²⁴Universitas Andi Djemma

³Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

aqilaalfa@gmail.com¹, igamaru19@gmail.com², masjrul.mj@gmail.com³,
ariefferdian663@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip good governance pada tingkat mikro, dengan fokus pada Pemerintah Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo, khususnya dalam aspek integritas, transparansi, dan responsivitas terhadap komunitas pesisir. Good governance merupakan pilar utama dalam tata kelola publik yang efektif, terutama di wilayah pesisir yang menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini, melalui wawancara mendalam terhadap aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga pesisir, serta observasi lapangan dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas aparatur kelurahan tergolong baik, ditandai oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, meskipun masih ditemukan tantangan dalam pengelolaan anggaran secara transparan. Transparansi informasi publik belum berjalan optimal akibat keterbatasan media komunikasi dan rendahnya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Responsivitas aparat dalam menangani kebutuhan masyarakat dinilai cepat dalam situasi darurat, namun belum disertai perencanaan jangka panjang yang terstruktur. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan erat dan secara kolektif memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai strategi untuk mewujudkan pemerintahan kelurahan yang akuntabel, transparan, dan responsif. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan lokal berbasis prinsip tata kelola yang baik dan partisipatif di kawasan pesisir.

Kata Kunci: **Good Governance, Integritas, Transparansi, Responsivitas, Pemerintah Kelurahan, Komunitas Pesisir**

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of good governance principles at the micro level, particularly in the Government of Ponjalae Sub-District, Palopo City, focusing on aspects of integrity, transparency, and responsiveness toward the coastal community. Good governance is a crucial pillar of effective public administration, especially in coastal areas that face complex socio-economic and environmental pressures. A qualitative approach using a case study method was employed, involving in-depth interviews with local government officials, community leaders, and coastal residents, as well as field observations and document analysis. The findings reveal that the integrity of local officials is relatively strong, as indicated by a high level of public trust,

although challenges remain in transparent budget management. Public information transparency is still limited due to a lack of communication media and low citizen participation in decision-making processes. The responsiveness of the local government is considered prompt in emergencies but lacks long-term and systematic planning. These three aspects are closely interconnected and significantly influence the quality of governance at the sub-district level. The study recommends strengthening the capacity of local officials, utilizing information technology, and increasing public participation as key strategies for achieving accountable, transparent, and responsive local governance. The findings provide important insights for the development of local policies based on the principles of good and participatory governance in coastal regions.

Keywords: Good Governance, Integrity, Transparency, Responsiveness, Local Government, Coastal Community

PENDAHULUAN

Good governance, atau tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan konsep fundamental dalam administrasi publik yang semakin mendapat perhatian, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Konsep ini lahir dari urgensi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan legitimasi pemerintahan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara (Bahtiar et al., 2025). Dalam implementasinya, good governance ditopang oleh sejumlah prinsip utama, yaitu integritas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsivitas (Pakudu & Sos, 2024). Kelima prinsip tersebut tidak hanya mendukung terciptanya tata kelola yang bersih dan efisien, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat serta keberlanjutan Pembangunan (Riwanto & Suryaningsih, 2024).

Penerapan prinsip-prinsip good governance pada tingkat mikro, khususnya di lingkungan kelurahan, menghadirkan tantangan dan dinamika tersendiri. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memegang peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan publik, penyediaan layanan dasar, serta pengelolaan sumber daya lokal. Di Kelurahan Ponjalae, yang merupakan salah satu wilayah pesisir di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir menciptakan kerangka yang unik dalam memahami bagaimana prinsip good governance dijalankan. Komunitas pesisir di wilayah ini tidak hanya berhadapan dengan persoalan klasik seperti kemiskinan dan keterbatasan akses layanan publik, tetapi juga menghadapi tantangan ekologis seperti abrasi pantai dan dampak perubahan iklim (LAIA, 2025).

Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara idealisme teori good governance dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan. Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa aspek integritas aparatur, transparansi informasi publik, dan responsivitas pemerintahan kelurahan masih memerlukan penguatan (Prasetyo, 2016). Masalah-masalah seperti lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, serta lambatnya respon terhadap isu-isu krusial, khususnya dalam pengelolaan

lingkungan pesisir, menjadi indikasi belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Widiastuti et al., 2025).

Kesenjangan dalam literatur juga masih terlihat, terutama terkait kajian good governance di tingkat kelurahan yang memiliki karakteristik pesisir. Padahal, konteks lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi prinsip-prinsip tata kelola tersebut (Astuti & Uik, 2023). Dalam kerangka teoretis, (S. P. Sumiyati & IP, n.d.) menekankan bahwa tata kelola yang baik harus mengedepankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, serta penegakan hukum (rule of law). (S. Sumiyati & Darsono, 2023) juga menyoroti pentingnya integritas sebagai pilar utama untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah (Zein & Septiani, 2024). Dalam hal responsivitas, Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya akses yang adil dan kecepatan tanggapan terhadap kebutuhan Masyarakat (Dewi, n.d.).

Penelitian Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2017) menunjukkan bahwa kualitas good governance yang tinggi memiliki korelasi positif dengan meningkatnya mutu pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, pada tataran implementatif di daerah pesisir seperti Ponjalae, masih banyak ditemukan hambatan struktural maupun kultural yang menghalangi optimalisasi good governance. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka dan partisipatif (Prihatini et al., 2025).

Dalam konteks ini, integritas aparatur menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan aspek-aspek lainnya. Aparatur yang berintegritas cenderung menjalankan tugas dengan jujur, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat (Hood, 2016). Lemahnya integritas di level ini rentan menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas pelayanan public (Suwanda & Tjenreng, 2025).

Sementara itu, transparansi menjamin keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan program pemerintah, yang menjadi prasyarat bagi akuntabilitas (Hesi et al., 2025). Dalam era digital, keterbukaan ini seharusnya dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, di Kelurahan Ponjalae, keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital menjadi kendala utama dalam mewujudkan transparansi yang efektif (Idrus et al., 2024).

Responsivitas pemerintah, yang merujuk pada kemampuan dan kesiapan dalam merespon kebutuhan masyarakat, merupakan dimensi krusial lainnya dalam good governance. Warga yang merasa didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dihasilkan. Sayangnya, di

wilayah pesisir Ponjalae, respons pemerintah terhadap isu-isu lingkungan dan sosial masih bersifat reaktif dan jangka pendek (Ibrahim & Olii, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Ponjalae dengan fokus pada integritas, transparansi, dan responsivitas. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengayaan literatur good governance di tingkat lokal, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan di wilayah pesisir (Kamelia & Veranita, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara holistik dalam konteks kehidupan nyata, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan di tingkat mikro yang kompleks dan kontekstual (Hasibuan et al., 2022).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kelurahan Ponjalae beserta komunitas pesisir sebagai pihak yang berinteraksi langsung dalam praktik tata kelola pemerintahan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi resmi dari kantor kelurahan. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur agar fleksibel dalam menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan terkait aspek integritas, transparansi, dan responsivitas pemerintah kelurahan.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan peran dan keterlibatan informan dalam proses pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat pesisir. Informan terdiri atas 15 aparatur kelurahan yang aktif dalam penyelenggaraan layanan publik, serta 30 warga pesisir yang terlibat atau terdampak langsung oleh kebijakan dan program pemerintah kelurahan. Pemilihan informan mempertimbangkan aspek keberagaman usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat keterlibatan dalam kegiatan komunitas.

Teknik observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta mendokumentasikan aktivitas-aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan aspek good governance. Dokumentasi yang dianalisis meliputi notulen musyawarah kelurahan, laporan realisasi anggaran, program kerja tahunan, serta pengumuman publik.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik thematic analysis sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), yang melibatkan proses pengkodean data, identifikasi tema-tema utama, dan interpretasi makna yang terkandung dalam data. Analisis dilakukan secara iteratif untuk menjamin keterpaduan antara data empiris dan kerangka teoretis. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan member checking dengan melibatkan informan dalam verifikasi hasil wawancara. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan relevan mengenai dinamika tata kelola

pemerintahan di tingkat kelurahan, khususnya dalam kaitannya dengan integritas, transparansi, dan responsivitas terhadap komunitas pesisir (Moleong, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip good governance pada tingkat kelurahan melalui tiga dimensi utama: integritas, transparansi, dan responsivitas. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketiga aspek tersebut diimplementasikan oleh Pemerintah Kelurahan Ponjalae dalam melayani komunitas pesisir. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, survei, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik yang mengacu pada literatur dan kerangka konseptual yang relevan (Abdussamad et al., 2024).

Integritas Aparatur Pemerintah Kelurahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas warga menilai integritas aparatur Kelurahan Ponjalae berada pada tingkat yang cukup baik. Sekitar 78% responden menyatakan kepercayaan mereka terhadap aparatur kelurahan yang dinilai menjalankan tugas secara jujur dan adil tanpa indikasi kuat praktik korupsi maupun nepotisme. Salah satu warga menyampaikan, “Saya merasa pegawai kelurahan di sini cukup jujur dan tidak mempersulit warga. Jika ada masalah, mereka selalu berusaha membantu dengan adil” (Wawancara, 2025).

Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran dari sebagian warga terkait transparansi dalam pengelolaan anggaran, khususnya dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Beberapa informan mengungkapkan tidak adanya kejelasan mengenai mekanisme penyaluran dan penggunaan dana kelurahan, yang memunculkan potensi penyimpangan.

Temuan ini sejalan dengan Kusumawati dan Ismail (2021), yang menyatakan bahwa tekanan sosial dan ekonomi di wilayah pesisir dapat memengaruhi integritas aparatur, khususnya dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas. Untuk itu, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal secara partisipatif diperlukan guna menjaga integritas dan mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan (Tabo et al., 2022).

Transparansi Informasi Publik

Transparansi merupakan elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat upaya pemerintah kelurahan untuk menyediakan informasi publik, cakupannya masih terbatas. Sebanyak 65% warga menyatakan mengetahui informasi dasar mengenai agenda dan kegiatan kelurahan, namun hanya sebagian kecil yang memahami rincian anggaran dan keputusan strategis.

Masih dominannya penggunaan metode komunikasi konvensional, seperti papan pengumuman dan pertemuan tatap muka, menjadi kendala dalam penyebaran informasi, terutama kepada masyarakat pesisir yang tinggal jauh dari pusat kelurahan. Salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan, “Kalau soal info, kadang kita harus tanya langsung ke kantor kelurahan, tapi tidak semua warga bisa datang, apalagi yang bekerja sebagai nelayan” (Wawancara, 2025).

Studi Rahman, Alam, dan Noor (2018) menegaskan bahwa transparansi sangat dipengaruhi oleh media komunikasi yang inklusif. Dalam konteks Kelurahan Ponjalae,

pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan portal digital masih belum optimal. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam forum pengambilan keputusan masih terbatas, terutama dari kelompok perempuan dan pemuda pesisir, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif (Karina, 2022).

Responsivitas Pemerintah Kelurahan

Dimensi responsivitas mencerminkan kemampuan pemerintah kelurahan dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan warga secara cepat dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kelurahan responsif terhadap situasi darurat, seperti banjir dan abrasi pantai. Tindakan cepat dalam mengkoordinasikan bantuan darurat dengan instansi terkait merupakan salah satu kekuatan pemerintahan lokal di Ponjalae.

Namun, respons tersebut cenderung bersifat reaktif dan belum disertai dengan perencanaan jangka panjang yang sistematis. Seorang warga menyampaikan, “Setiap musim hujan, rumah kami selalu banjir. Pemerintah sudah datang bantu, tapi hanya sementara. Kami butuh solusi yang tahan lama” (Wawancara, 2025).

Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa responsivitas yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui kecepatan, tetapi juga kualitas kebijakan dan keterlibatan warga dalam perencanaan. Oleh karena itu, perumusan program yang adaptif terhadap risiko lingkungan jangka panjang menjadi keharusan di wilayah pesisir seperti Ponjalae (Anggraini, 2020).

Keterkaitan antara Integritas, Transparansi, dan Responsivitas

Tiga aspek good governance yang dianalisis dalam penelitian ini saling berkaitan erat dan membentuk fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif. Integritas yang tinggi mendorong keterbukaan dalam menyampaikan informasi publik, sementara transparansi memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas. Responsivitas menjadi manifestasi nyata dari integritas dan transparansi dalam tindakan pemerintahan yang dirasakan langsung oleh warga.

Namun, ketidakseimbangan di antara ketiga aspek tersebut dapat menghambat efektivitas tata kelola. Misalnya, aparat yang memiliki integritas tetapi bekerja dalam sistem yang kurang transparan tetap berisiko menimbulkan ketidakpercayaan publik. Sebaliknya, keterbukaan informasi yang tidak diiringi dengan respons yang tanggap dan solutif hanya akan menimbulkan ekspektasi tanpa realisasi (Yusman et al., 2024).

Implikasi Kebijakan dan Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis guna memperkuat implementasi good governance di Kelurahan Ponjalae:

- Penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan etika kerja dan integritas, serta penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Peningkatan akses informasi dengan mengembangkan media digital kelurahan seperti situs resmi, kanal media sosial, dan aplikasi komunitas agar informasi dapat diakses secara merata, termasuk oleh kelompok marginal.
- Pemberdayaan partisipasi warga, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan nelayan muda, melalui forum dialog yang terbuka dan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif.

- Pengembangan perencanaan responsif dan berkelanjutan, terutama untuk menghadapi persoalan lingkungan di wilayah pesisir, dengan mengintegrasikan pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, akademisi, dan komunitas local (Nasution et al., 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip good governance pada tingkat mikro, dengan fokus pada Pemerintah Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo. Tiga aspek utama yang dianalisis mencakup integritas, transparansi, dan responsivitas dalam pelayanan kepada komunitas pesisir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Integritas aparatur kelurahan dinilai cukup tinggi oleh masyarakat, yang tercermin dalam minimnya praktik koruptif dan kuatnya kepercayaan publik. Meskipun demikian, masih ditemukan indikasi ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran, sehingga mekanisme akuntabilitas perlu diperkuat.
2. Transparansi informasi publik telah dijalankan secara parsial. Informasi dasar disediakan, tetapi belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh warga, terutama kelompok rentan seperti nelayan, perempuan kepala keluarga, dan warga yang tinggal jauh dari pusat kelurahan. Keterbatasan sarana komunikasi dan teknologi menjadi hambatan utama.
3. Responsivitas pemerintah kelurahan relatif baik dalam konteks penanganan isu-isu mendesak, seperti bencana banjir dan abrasi pantai. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat jangka pendek dan kurang terintegrasi dalam perencanaan strategis jangka panjang.
4. Keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial terhadap ketiga aspek tersebut. Sebaliknya, integritas, transparansi, dan responsivitas harus dipandang sebagai satu kesatuan sistemik yang saling memperkuat. Ketidakseimbangan dalam penerapan ketiganya berpotensi mengurangi efektivitas, efisiensi, dan legitimasi pemerintah kelurahan di mata masyarakat.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis berikut:

1. Penguatan kapasitas aparatur kelurahan, terutama dalam hal etika birokrasi, manajemen keuangan publik, dan penerapan prinsip integritas, melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja berbasis indikator tata kelola.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan transparansi. Pemerintah kelurahan perlu mengembangkan platform digital resmi yang menyajikan informasi anggaran, program kerja, dan ruang partisipasi publik secara terbuka dan mudah diakses.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok marjinal, melalui forum musyawarah yang lebih inklusif serta fasilitasi dialog antara pemerintah dan warga. Partisipasi yang luas dan representatif akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan rasa memiliki di kalangan warga.
4. Pengembangan perencanaan responsif dan kolaboratif, dengan menekankan pada mitigasi risiko jangka panjang terhadap tantangan lingkungan dan sosial. Pemerintah

kelurahan perlu bermitra dengan dinas teknis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan solusi berkelanjutan bagi wilayah pesisir.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat implementasi good governance di level kelurahan, khususnya dalam konteks masyarakat pesisir yang menghadapi tantangan struktural dan ekologis. Pendekatan kolaboratif, berbasis data, dan partisipatif perlu terus dikembangkan untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang inklusif, akuntabel, dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Sakir, M., & Dunggio, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik di Kantor Lurah Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, Dan Pelayanan Publik*, 11(1), 353–361.
- Anggraini, K. (2020). Pengembangan Kapasitas Pegawai untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Astuti, I., & Uik, A. (2023). *Model Tata Kelola Kearsipan Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan)= Archives Governance Model In Realizing Good Governance (Case Study At The Regional Office Of The Ministry Of Religion South At The Regional Office Of The Ministry Of Religion South Sulawesi Province*. Universitas Hasanuddin.
- Bahtiar, B., Diantama, S., & Arlovin, T. (2025). Transformation Of Sharia Business Management Governance In The Digital Era. *Jurnal Fokus Manajemen*, 5(3), 635–644.
- Dewi, Y. S. (n.d.). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Sebagai Pilar Good Governance: Refleksi Tata Kelola Pemerintah Daerah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 23(1), 53–63.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hesi, C. Z., Harmi, F., Nabilah, K., Indriani, S. M., & Saputra, B. (2025). Kontekstualitas Dalam Implementasi Good Governance: Studi Multi-Kasus Inovasi Dan Tantangan Di Kelurahan Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1240–1245.
- Ibrahim, R., & Olli, R. A. (2024). Strategi Reformasi Birokrasi Di Tingkat Lokal: Perspektif Good Governance Dalam Otonomi Daerah Kecamatan Kwandang. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 769–774.
- Idrus, S. H., Akib, H., & Kesuma, A. I. (2024). Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Penerapan Prinsip Good Governance: Tinjauan dari Perspektif Lokal dan Global. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 2194–2205.

- Kamelia, L., & Veranita, M. (2022). Analisis implementasi good governance dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. *Publik*, 9(2), 289–299.
- Karina, A. (2022). *Pengaruh Good Badan Layanan Umum Governance Bidang Kesehatan Terhadap Transparansi Keuangan Implikasinya Kepada Efisiensi Belanja*. Universitas Hasanuddin.
- LAIA, H. (2025). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)(Studi di Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkring Sleman)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, K., Nasution, M. A., Rustiyana, R., Rachim, A., Baskoro, S. E., Reynilda, R., Devianty, T., Nampira, R. A., Lumbanraja, V., & Vidiastuti, D. P. (2025). *Kebijakan Publik Dalam Perspektif Manajemen Modern: Inovasi, Tata Kelola, dan Akuntabilitas*. Star Digital Publishing.
- Pakudu, R., & Sos, S. (2024). *Sinergi Birokrasi: Membangun Pelayanan Publik Yang Efektif*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Prasetyo, B. (2016). *Analisis Hubungan Implementasi e-Government terhadap Peningkatan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Prihatini, E. N., Mayarni, M., As' ari, H., & Desiarti, E. (2025). Telaah Respons Lingkungan Sosial Kampus Terhadap Agile Governance dan Zona Integritas Di Perguruan Tinggi: An Examination of The Response of The Campus Social Environment to Agile Governance and Integrity Zones In Universities. *Anterior Jurnal*, 24(3), 52–60.
- Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). Ar. Strategi pencegahan korupsi pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–20.
- Sumiyati, S., & Darsono, D. (2023). Pelaksanaan Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2).
- Sumiyati, S. P., & IP, M. (n.d.). *Penguataan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Manajemen Pemerintahan Desa: Studi Kasus Di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban*.
- Suwanda, I. G. M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 271–282.
- Tabo, S., Agustang, A., Idkhan, A. M., Rifdan, R., & Makmur, M. A. (2022). Penataan

Kelembagaan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada SKB Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(1), 64–74.

Widiastuti, I., Sumarna, E., Geohansa, A., & Fauzi, F. (2025). Deskripsi Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 5(2), 321–329.

Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital*. Serasi Media Teknologi.

Zein, H. M. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka.